



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097  
Majalengka 45418

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 46 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) POS PAUD JELITA  
DESA TEJA KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**Menimbang :** a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara POS PAUD JELITA Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Nomor 01/POS PAUD-J/1/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rajagaluh 401.1/022/UPTD Pendidikan/2016 tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 8 Pebruari 2016 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD JELITA Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD JELITA Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD tersebut, maka izin penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD ini akan dicabut.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1143-Disdik tanggal 16 April 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 16 - 2 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rajagaluh di Rajagaluh





## KEPUTUSAN

## KEPALA DESA TEJA

Nomor 420 / 21 / 2012

## PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA

## POS PAUD JELITA

## KEPALA DESA TEJA

Menimbang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan musyawarah yang dihadiri unsur aparat desa perwakilan warga Desa Teja dan Penilik PAUD Kecamatan Rajagaluh, telah memutuskan untuk membentuk suatu Penyelenggara Pos Paud.</li><li>2. Bahwa atas dasar pertimbangan pasal 1 (satu) di atas maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Penyelenggara Pos Paud.</li></ol>
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Indonesia Tahun 1950 )</li><li>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 3041 ).</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembar Daerah Tahun 2004 Nomor 27 seri B ).</li></ol>

## MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA POS PAUD
Pertama	Menunjukan bahwa menetapkan Susunan Penyelenggara Pos Paud JELITA Desa Teja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

:

Teja

pada Tanggal

:

21 Januari 2012



Tembusan; Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Camat Rajagaluh

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJA**

Nomor : 4.20 / 01 / 2012

Tanggal : 21 Januari 2012

Tentang : Penetapan Pengurus Pos PAUD Jelita  
Desa Teja Kecamatan Rajagaluh

**SUSUNAN PENGURUS POS PAUD JELITA  
DESA TEJA KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA**

1. Ketua Penyelenggara : **SITI HODIJAH**

2. Sekretaris : **EDAH**

3. Bendahara : **ADE SUARDI**

**Seksi-Seksi :**

Seksi Kurikulum : **NURHAYATI**

Seksi Sarana Prasarana : **IIS KARTINI**

Seksi Warga Belajar : **ROHAETI**

Ditetapkan di : Teja

Pada tanggal : 21 Januari 2012

---

  
**WIWI WIDIAWATI**